



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.13, No.2, Desember 2016

# OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otonomi dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

## RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

## REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



**Mitra Bestari**

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)  
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)  
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)  
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

**Penanggung Jawab**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

**Pemimpin Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

**Redaksi Pelaksana**

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)  
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP  
Devi Darmawan, S.H  
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com  
Website: www.politik.lipi.go.id

**ISSN**

1829-8001

**DAFTAR ISI**

<b>Daftar Isi</b>		i–ii
<b>Catatan Redaksi</b>		iii–iv
<b>Artikel</b>		
	• <b>Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia</b> <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
	• <b>Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah</b> <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
	• <b>Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan</b> <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
	• <b>Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa</b> <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
	• <b>Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah</b> <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
<b>Resume Penelitian</b>		
	• <b>Masa Depan Partai Islam di Indonesia</b> <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
	• <b>Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia</b> <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
<b>Review Buku</b>		
	• <b>Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah</b> <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
<b>Tentang Penulis</b>		269–270
<b>Pedoman Penulisan</b>		271–275

## CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodada dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otodada untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

## **Redaksi**

---

**DDC: 303:324.998**

**Kadek Dwita Apriani dan Irhamna**

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL  
PENGANGGARAN PARTISIPATIF  
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI  
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148**

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

**Kata kunci:** dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

---

**DDC: 303:324.998**

**Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady**

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI  
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA  
DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166**

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

**Kata Kunci:** sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

---

**DDC: 351.17**

**Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu**

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI  
PREDATOR DI WAKATOBI:  
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU  
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191**

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

**Kata Kunci:** Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

---

**DDC: 352.4**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS  
DANA DESA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211**

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** otonomi desa, efektivitas, dana desa

---

**DDC: 352.14**

**R. Siti Zuhro**

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:  
MASALAH DAN TANTANGAN  
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225**

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

---

**DDC: 324.23**

**Moch. Nurhasim**

### **MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244**

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politis di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

**Kata Kunci :** Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

---

**DDC: 320.962.4**

**Nostalgawan Wahyudhi**

### **PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260**

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

**Kata kunci:** Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

---

**DDC: 307.72**

**Yusuf Maulana**

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA  
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268**

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

**Kata Kunci** : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

---

**DDC: 352.14**

**Kadek Dwita Apriani dan Irhamna**

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS  
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL  
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE  
STUDIES IN THREE PROVINCES IN  
INDONESIA***

*Journal of Political Research*

*Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148*

*Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater*

*the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.*

*Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses*

---

**DDC: 303:324.998**

**Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady**

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF  
INDONESIAN WOMEN PATH  
TO LOCAL POLITICS***

*Journal of Political Research*

*Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166*

*This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.*

**Keywords:** socio-economic condition, university, internet, female local leader.

---

**DDC: 351.17**

**Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu**

**DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191**

*The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major government tourist projects. This group of politicians and enterprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.*

**Keywords:** Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

---

**DDC: 352.4**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

**VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211**

*The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.*

**Keywords:** village autonomy, effectiveness, village fund

---

**DDC: 352.14**

**R. Siti Zuhro**

**LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION**

**Journal of Political Research**

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225**

*After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation*

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

**Keywords:** decentralization, local autonomy, local government, public services.

---

**DDC: 324.23**

**Moch. Nurhasim**

### **THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA**

*Journal of Political Research*

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244**

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

**Keywords:** Party, Islamic Party, Democracy, Election

---

**DDC: 320.962.4**

**Nostalgawan Wahyudhi**

### **THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA**

*Journal of Political Research*

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260**

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

**Keywords:** Political Islam, Arab Spring, Democracy

---

**DDC: 307.72**

**Yusuf Maulana**

### **INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY**

*Journal of Political Research*

**Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268**

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

**Keywords:** village, decentralization, autonomy, institutional.

**RESUME PENELITIAN**  
**PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO,**  
**SUDAN, DAN SOMALIA<sup>1</sup>**

**RESEARCH SUMMARY**  
**THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN**  
**MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA**

**Nostalgiaawan Wahyudi, M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar,**  
**Dhurorudin Mashad, Indriana Kartini**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto no. 10, Jakarta  
*e-mail: wan\_jauzy@yahoo.com*

Diterima: 24 Oktober 2016; direvisi: 11 November 2016; disetujui: 30 Desember 2016

**Abstract**

*This research is conducted to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab Spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reasons. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study shows that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.*

**Keywords:** Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia

**Abstrak**

Riset ini dilakukan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia pasca Arab Spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena “*backward bending process*” dimana gejolak politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

**Kata Kunci:** Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti terdiri atas M. Fakhry Ghafur (koordinator), M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Indriana Kartini, Nostalgiaawan Wahyudhi.

## Pendahuluan

Problematika demokratisasi di Timur Tengah, sejatinya bukanlah berakar dari agama (Islam sebagai agama mayoritas), tetapi lebih dikarenakan ketidakmampuan rezim otoriter yang gagal menerapkan demokrasi dan memecahkan masalah kesejahteraan ekonomi, partisipasi politik, keadilan sosial dan lain-lain. Ketidakmampuan rezim ini memicu tumbuhnya gerakan oposisi yang menggunakan Islam sebagai dasar untuk mendapatkan identitas dan legitimasi politik, disisi lain juga dijadikan landasan ideologis bagi tatanan kehidupan masyarakat. Kompleksitas permasalahan ini menemukan momentumnya di Tunisia dan menjadi gerakan *Arab Spring* sebagai bentuk gelombang demokratisasi yang masif di kawasan Timur Tengah.

Gerakan politik Islam di beberapa negara yang sudah dikaji pada tahun sebelumnya (Yaman, Suriah dan Aljazair), menjadi parameter kajian saat ini. Karena hasil penelitian tersebut menemukan adanya gerakan *backward bending*, pembalikan politik ke arah asal yaitu otoritarianisme. Pemilihan negara kasus pada penelitian saat ini, Maroko, Sudan, dan Somalia sangat menarik untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Mengingat aktivitas politik gerakan Islam transnasional seperti *Ikhwanul Muslimin* (IM) sangat eksis di tiga negara kasus tersebut.

Sudan memiliki posisi yang sangat unik, dimana awalnya kekuatan politik Islam bersatu dengan militer membentuk pemerintahan baru yang Islamis. Namun, kemenangan ini justru membuat kekuatan politik Islam memilih menjadi oposisi dan berkonsentrasi dalam politik yang menentang pemerintahan militer-Islamis pimpinan Omar Bashir. Sedangkan di Maroko, politik Islam semakin kuat dan meluas di kalangan rakyat bawah ditengah kuatnya politik rezim monarki yang bercorak sosialis-sekuler. Berbeda dengan kedua negara di atas, Somalia memiliki tingkat kompleksitas permasalahan yang paling tinggi karena kekuatan politik Islam tumbuh ditengah kondisi negara yang gagal (*failed state*) dan politik klan yang kuat. Kekuatan politik Islam tumbuh dalam bentuk perlawanan politik terhadap intervensi internasional dan pemerintahan despotik yang tidak aspiratif.

Melihat kompleksitas peta kekuatan politik Islam dalam konstelasi politik di ketiga negara tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: *Pertama*, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tumbuhnya kekuatan politik Islam secara signifikan di Maroko, Sudan, dan Somalia? *Kedua*, bagaimana peran kekuatan politik Islam terhadap pertumbuhan demokrasi di tiga negara tersebut? *Ketiga*, bagaimana implikasinya terhadap pertumbuhan demokrasi di tiga negara tersebut?

## Maroko, Sudan, dan Somalia dalam Bingkai Sejarah Budaya Politik

Sejarah Islam di Maroko dapat dilihat dari kebangkitan apa yang disebut sebagai "*Murabitun*" pada abad kesebelas dan "*Muwahhidun*" pada abad kedua belas. Keberadaan Dinasti *al-Murabitun*<sup>2</sup> berawal dari sekelompok pejuang yang disebut *al-Mulassimun* karena mereka selalu menutup wajah untuk melindungi diri dari terik panas matahari di gurun pasir Magribi (Maroko sekarang). Kelompok itu berasal dari kabilah Lemtuna, sebuah kabilah bangsa Berber di wilayah gurun pasir Magribi yang bernama Sanhaja. Mereka menyebarkan agama Islam dengan mengajak suku-suku lain untuk menganut agama Islam. Mereka mengikuti ajaran *Mazhab Salaf* (Gerakan Salafiyah) secara ketat. Wilayah dakwah mereka meliputi Afrika barat daya dan daerah Spanyol.

Kemudian pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, di Maroko ada gerakan reformasi Salafi. Gerakan Salafi ini mengkritik keras adanya pengkultusan terhadap orang-orang suci. Mereka ingin merasionalisasi penafsiran Islam dengan kembali ke sumber aslinya, tanpa penafsiran yang macam-macam. Dengan keras, mereka ingin kembali ke *hadits*, bukan bersandar kepada aturan *fiqh*, yang dianggap mewakili penafsiran pada masa tertentu. Dengan penafsiran itu, aturan menjadi kaku tanpa koneksi ke sumber aslinya maupun masyarakat Maroko.

<sup>2</sup> Tentang Al-Murabitun, antara lain, dapat dilihat Nazeer Ahmed, "The Murabitun in the Maghreb," dalam <http://historyofislam.com/murabitun/>, (diakses pada 11 November 2015).

Pasca kemerdekaan pada tahun 1956, muncul gerakan yang dapat dikatakan fundamentalis. Gerakan itu dapat dikatakan bermula pada tahun 1969. Ketika itu, Abd al-Karīm Muti' mendirikan organisasi "Pemuda Islam" (*Shabiba Islamiyyah*). Itu adalah sebuah gerakan politik bawah tanah untuk melawan ajaran ateisme, khususnya kelompok kiri yang ada di kampus universitas. Munculnya *Shabiba Islamiyyah* dipengaruhi oleh ideologi yang berasal dari tulisan-tulisan Sayyid Qutb, Mesir. Organisasi *Shabiba Islamiyyah* itu kemudian disahkan oleh pihak Kerajaan pada tahun 1972. *Shabiba* berkembang pesat, terutama, di kampus-kampus universitas dan banyak mempengaruhi pandangan dan sikap mahasiswa Maroko. Tetapi pembunuhan aktivis buruh, Umar Ibn Jallūn, pada tahun 1975 oleh beberapa anggota *Shabiba* telah menyebabkan terusnya Abd al-Karīm Muti' dan pembubaran organisasi *Shabiba*.

Pada tahun 1998, kelompok *Shabiba* membentuk suatu partai politik yang diberi nama "Partai Keadilan dan Pembangunan" (*Party of Justice and Development - PJD*). Dengan menggunakan PJD, mereka berusaha berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan pemilu dewan kota. Anggota mereka adalah para lulusan dari sistem pendidikan Arab. PJD sendiri terkait erat dengan jaringan sekitar dua ratus asosiasi Islam yang tergabung dalam Gerakan Persatuan dan Pembaruan. Gerakan itulah yang menjadi motor alat perekrutan anggota dan alat kampanye pemenangan PJD. Partai ini mempunyai ideologi yang sangat dekat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin, Mesir. Mereka ingin berkiprah dalam koridor hukum dan tetap setia pada garis komando ideologi Ikhwan. Mereka bersikeras menciptakan kehidupan publik yang bermoral, menciptakan warga percaya dan mau menerapkan syaria Islam dalam kehidupan kesehariannya.

Adapun sejarah Islam di Sudan, ada istilah yang disebut sebagai "Imam Mahdi". Gerakan Imam Mahdi ingin menyadarkan umat Islam di dunia selama abad ke-18 dan ke-19 dan menghasilkan puritanisme. Gerakan ini berpandangan bahwa sudah saatnya umat Islam terbebas dari belenggu ketidakadilan yang menjerat mereka. Dengan idealismenya, mereka ingin mengubah Sudan sesuai dengan konsepnya.

Sebelum ada gerakan Mahdi, di Sudan sudah ada sufi *Khatmiyya* (kadang-kadang disebut *Mirghaniyya*, sesuai nama pendirinya). Gerakan itu menggabungkan sufi dan kepemimpinan suku. Selama tahun 1821-1885, gerakan sufi *Khatmiyya* cukup berjaya di wilayah Sudan. Pada waktu yang bersamaan, wilayah Sudan di bawah kekuasaan Turki-Mesir. Oleh karena itu, ketika gerakan Mahdi muncul, ada persaingan dengan *Khatmiyya*. Para pemimpin *Khatmiyya* yang didukung oleh kekuasaan Turki, berusaha menghadang pemberontakan Mahdi. Pertikaian antara pendukung Mahdi dan orang-orang *Khatmiyya*, yang berakar di abad ke-19, terus berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

Ketika berdiri "Kongres Sarjana" pada 1938, anggota mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pro-Mahdi dan ada yang pro-*Khatmi*. Kebanyakan partai politik besar yang muncul pada 1940-an juga berada dalam naungan salah satu dari dua Sayyid tersebut. Tanpa perlindungan itu, mereka akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak. Berdirinya asosiasi kaum terdidik muda yang bersandingan dengan dua organisasi keagamaan besar itu, membawa fenomena unik dan berdampak luas pada perkembangan kehidupan masyarakat Sudan. Di satu sisi, hal itu menciptakan situasi di mana keputusan politik tergantung pada pimpinan faksi besar agama. Di sisi lain, itu dapat mendorong kaum elite terpelajar yang aktif berpolitik tetapi tidak mau bergabung dengan salah satu dari dua kelompok keagamaan tersebut, akan membentuk kelompok sendiri yang lebih radikal.

Akibat kondisi tersebut, selama Perang Dunia Kedua, di Sudan muncul Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1954, muncul pula gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Sepuluh tahun kemudian, 1964, gerakan IM mendirikan organisasi politik yang disebut *Islamic Charter Front* (ICF). Organisasi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang signifikan dengan berbagai fungsi. ICF mewakili organisasi modern perkotaan, bila dibandingkan dengan sufi tarekat tradisional (Ansar, *Khatmiyya* dan Partai Umma).<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Lihat Gabriel R. Warburgm, "Islam and the State in Numayri's Sudan," dalam *Journal of*

Pada tahun 1969, ICF mengajukan draft moderat Konstitusi Islam. Usul itu didukung oleh dua sekte sufi, Ansar dan *Khatmiyya*. Proposal itu diajukan oleh ICF menjelang kudeta militer pimpinan Numayri, 1969. Apa yang diinginkan oleh ICF tidak mudah, karena itu harus mengubah Konstitusi. Untuk mengubah Konstitusi yang Islamis, ICF harus berhadapan dengan kelompok lain, Partai Komunis Sudan (CPS), yang menginginkan negara sekuler. Akhirnya, Hassan al-Turabi berkolaborasi dengan Jenderal Omar Hasan Ahmad al-Bashir mengambil alih kekuasaan dari Numayri pada 1985. Setelah penggulingan tersebut, ICF melakukan reorganisasi dan berubah dengan nama *National Islamic Front* (NIF). Turabi membentuk NIF sebagai partai politik bersama-sama dengan sejumlah kelompok Islam. Partai itu menjadi blok ketiga di parlemen pada tahun 1986.

Kolaborasi Turabi dan Bashir juga membawa mereka ke dalam persaingan politik yang terlalu kentara. Sebenarnya perbedaan pandangan keduanya sudah terlihat tidak lama setelah jatuhnya Numayri. Pada 1 April 1996, ada pemilu pertama pasca penumbangan terhadap Presiden Numayri. Ketika itu, ada empat ratus orang terpilih menjadi anggota Majelis Nasional. Omar Bashir terpilih menjadi Presiden Sudan dengan 75,7% suara, dan Hassan al-Turabi terpilih menjadi Ketua Parlemen. Rupanya persaingan politik keduanya tidak dapat dikompromikan lagi. Maka, pada 12 Desember 1999, Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir memberlakukan keadaan darurat dan membubarkan parlemen. Sebagai Ketua Parlemen, Turabi pun mengutuk pembubaran Parlemen oleh Bashir dan menganggap sebagai “kudeta militer” serta menolak keadaan darurat karena inkonstitusional. Turabi menganggap Bashir sebagai “*The man has destroyed the constitution and liberties and betrayed the political system. He has also deceived the forces that brought him to power and supported him.*”<sup>4</sup>

---

*the International African Institute*, Vol. 55, No. 4, 1985, hlm. 400-413.

<sup>4</sup> Lihat “Coup in Sudan May be Turabi’s Swan Song,” dalam *Middle East Intelligence Bulletin*, Vol. 1 No. 12, December 1999; lihat juga “Coup in Sudan Maybe Turabi’s Swan Song,” dalam <https://www.meforum.org/meib/issues/9912.htm>, (diakses pada 11 November 2015).

Sementara itu, kebangkitan Islam di Somalia pada abad ke-19 dan ke-20 dipelopori oleh ulama sufi. Pada waktu itu, gerakan sufi *Qadiriyyah*, *Ahmadiyah* dan *Salhiya* menjadi kelompok tarekat sufi besar. Kemudian, pada tahun 1940, sebuah kesadaran dan gerakan baru Islam mulai muncul dan dikembangkan. Liga Islam Somalia, yang didirikan pada tahun 1952, adalah organisasi pertama untuk merespon peningkatan peran misionaris Kristen. Liga Islam juga mempromosikan pendidikan dalam bahasa Arab. Dari sekolah-sekolah ini, lahir generasi elit Somalia baru yang terdidik dalam budaya Arab.<sup>5</sup>

Selanjutnya, kebangkitan Islam yang sebenarnya terjadi setelah kemerdekaan Somalia, pada 1960-an dan 1970-an, ketika kaum terdidik dari universitas Arab membawa ideologi Islam modern ke seluruh penjuru Somalia. Berbagai organisasi kecil dibentuk untuk memacu adanya kebangkitan kesadaran Islam yang dipimpin oleh ulama Islam modern.

Akan tetapi, selama kekuasaan Somalia di bawah rezim sosialis, sejak tahun 1969, negara sosialis sekuler itu melarang semua organisasi non pemerintahan, termasuk organisasi Islam. Kemudian, pada tahun 1975, penguasa Somalia menyetujui undang-undang tentang kehidupan keluarga untuk melawan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah Somalia waktu itu, menginginkan masyarakatnya menjadi sekuler yang jauh dari prinsip kehidupan yang Islami. Akibatnya, ada berbagai protes dari masyarakat Muslim. Pemerintah melakukan tindakan yang keras terhadap para pemrotes. Maka, ribuan ulama Islam melarikan diri ke Arab Saudi, Mesir dan Sudan. Mereka menyelamatkan diri dan sekaligus memulai gerakan terorganisir di luar negeri. Muslim Somalia yang sebelumnya satu pandangan ideologi telah tersebar ke seluruh negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Di sana, mereka terpengaruh dengan ideologi setempat yang menyebabkan mereka berbeda pandangan. Ketika mereka kembali ke Somalia pada akhir tahun 1970, para ulama tersebut membawa ideologi mereka masing-masing

---

<sup>5</sup> Lihat Abdurahman M. Abdullahi, “Islamism and Politics in Somalia,” dalam <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Africa/120612summary.pdf>, (diakses pada 13 November 2015).

yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan pemahaman Islam.

Pada tahun 1978, Gerakan Islah lahir di Somalia yang merupakan cabang Ikhwanul Muslimin. *Al-Islah* mengadopsi pendekatan modern dan moderat Islam. Gerakan *al-Islah* mempromosikan reformasi Islam yang damai selama masa pemerintahan diktator (1969-1991) dan perang saudara (1991-2008).

Tampaknya di Somalia, ada “wajah” ideologi yang saling bertentangan. Pertama, ada konflik antara modernitas dan tradisional. Dalam beberapa kali kejadian, gerakan-gerakan Islam telah diartikan sebagai penentangan terhadap sebuah negara modern. Kedua, ada konflik terus-menerus antara Islamisme, kesukuan (*clanism*) dan nasionalisme. Ketiga, ada konflik antara ideologi yang berbeda dalam masyarakat Muslim. Di antara mereka ada penganut tasawuf, Salafisme dan Ikhwanul Muslimin.

Sejarah gerakan Islam sejalan dengan sejarah negara yang mengalami keruntuhan pada tahun 1991. Gerakan ekstremis muncul setelah tahun 1991 yang mengubah jalannya sejarah Somalia. Keterlibatan Al Qaeda mulai terasa, ketika mereka berusaha untuk mengeksploitasi Gerakan Islam al Itihaad selama perang saudara. Mereka menciptakan sebuah kelompok bersenjata yang terorganisir dengan agenda keislaman dan nasionalis. Ketika al Itihaad meninggalkan perjuangan bersenjata, kekosongan itu justru dimanfaatkan oleh *al-Shabaab*. Kelompok keras itu muncul kepermukaan Somalia, setelah tahun 2003.

### **Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko**

Dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya, yang terkena imbas fenomena Arab Spring, Maroko dianggap sebagai “pengecualian” dan selamat dari pergolakan politik, konflik sektarianisme dan perpecahan sosial. Label “*Moroccan exceptionalism*” kemudian sering digunakan oleh para pejabat pemerintah dan analis politik untuk menggambarkan situasi politik Maroko pasca *Arab Spring*.

Pada awal kekuasaannya, Muhammad VI mengeluarkan kebijakan demokratisasi di Maroko dan menanamkan kultur HAM di institusi negara. Ayahnya, Raja Hassan II, pada 1990an juga telah memahami bahwa Maroko perlu melakukan reformasi politik dan mulai mengimplementasikannya melalui pembentukan Kementerian HAM, meski langkah tersebut dianggap hanya institusional belum substansial. Bisa dikatakan bahwa di masa Muhammad VI aktivisme *civil society* meningkat termasuk organisasi-organisasi yang mempromosikan dan membela HAM. Organisasi-organisasi tersebut terlibat dalam pembentukan *Instance Equite et Reconciliation* (IER), yang memberikan legitimasi kepada Raja secara domestik dan internasional seperti reformasi *family law code* 2004 (Mudawana).<sup>6</sup>

Komisi IER mendapat perhatian internasional, namun perubahan signifikan yang dibawa Raja Muhammad VI adalah Mudawana (*family law code*). Perubahan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Raja, melainkan berbarengan dengan desakan dari sejumlah organisasi perempuan. Perubahan signifikan dalam Mudawana adalah meningkatnya hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak, dan harta warisan. Meski persoalan terkait hak perempuan masih terjadi, namun setidaknya telah terjadi kemajuan signifikan dibanding masa sebelumnya. Sebelum adanya Mudawana, kaum perempuan berada di posisi minor, sebagai warga negara kelas dua dan selalu menjadi subyek kontrol laki-laki, bahkan anak laki-laki si perempuan menjadi wali sah mereka.<sup>7</sup>

Selain perubahan yang berkaitan dengan hak perempuan, dikeluarkan pula kebijakan yang bertujuan mengubah proses pemilu dan institusi negara menjadi lebih demokratis. Hal ini terlihat dalam pemilu legislatif 2002 yang dipandang sebagai “turning point” yang dalam hal ini pihak pemerintah mengurangi campur tangan dalam proses pemilu. Lebih lanjut, pemerintah juga

<sup>6</sup> Emanuela Dalmaso & Francesco Cavatorta, “Political Islam in Morocco: Negotiating the Liberal Space Post 2003”, *Working Papers in International Studies*, Centre for International Studies, Dublin City University, No. 4, 2011, hlm.3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.70.

memberikan kesempatan kepada parlemen untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan ketimbang menyandarkan sepenuhnya kepada eksekutif yang ditunjuk oleh Raja.<sup>8</sup>

Sementara itu, ditengah perkembangan politik Maroko yang sangat dinamis, politik Islam yang mendapat dukungan dari kalangan bawah dapat berperan secara signifikan. Berdasarkan analisis Laskier dan Dalmasso & Cavatorta, terdapat empat kelompok Islam politik di Maroko, yakni *pertama*, kelompok toleran *Jama'at al-Adl wal-Ihsan (Justice and Charity)*, pimpinan Syekh Abd al-Salam Yasin; *kedua*, *Hizb al-Adala wal-Tanmiyya (The Party for Justice and Development)*, dipimpin oleh Dr. Abd al-Karim Khatib dan Abd al-Illah Benkiran; *ketiga*, kelompok radikal *Salafiya Jihadiya (Salafist Jihad)*; *keempat*, kelompok Sufi *Zaouiya Boutchichia*.<sup>9</sup>

*Kelompok pertama, Jama'at al-Adl wal-Ihsan (Justice and Charity/ JC)*, merupakan kelompok semi-legal yang sangat populer di masyarakat. Kelompok ini beroperasi seperti gerakan sosial yang memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat miskin. *Al-Adl* didirikan oleh Syekh Abd al-Salam Yasin. Debut politik Yasin dimulai pada 1974, ketika mengirimkan surat kepada Raja Hassan II, berjudul *al-Islam wal-Tufan (Islam and the Deluge)*, yang meminta Raja memegang teguh ajaran Islam dan meninggalkan kebijakan-kebijakan yang tidak Islami. Dalam surat tersebut, Yasin mengkritik imperialisme monarki, dekadensi Westernisasi, dan ketidakadilan sosial. Respons Raja adalah dengan memenjarakan Yasin selama tiga tahun. Setelah bebas, Yasin kemudian mempublikasikan majalah *Islam al-Jama'a*, yang menjadi fondasi awal gerakannya. Setelah *al-Jama'a* dibekukan pada 1983, Yasin kemudian mempublikasikan harian *al-Subh*. Harian ini kemudian dibekukan juga dan Yasin pun harus dipenjara kembali selama dua tahun. Meski diberi sedikit ruang bernafas, namun *al-Adl* tetap mendapat kekerasan

sistematis dari polisi.<sup>10</sup> Wafatnya Raja Hassan II dan diangkatnya Raja Muhammad VI justru membuat aktivitas *al-Adl* meningkat. Hal ini disebabkan karena dua faktor, yakni pertama, reformasi sosial yang dilakukan monarki baru kontradiktif dengan prinsip-prinsip Islam; kedua, karena kebijakan rezim pemerintahan baru yang membuka kebebasan politik dan ekspresi kultural yang lebih luas.

*Kelompok kedua, Hizb al-Adala wal-Tanmiyya (The Party for Justice and Development/ PJD)*, merupakan partai politik yang para pemimpinnya mau berpartisipasi dalam sistem politik dan dibolehkan untuk aktif dalam politik. Hal ini berbeda dengan kelompok *al-Adl* yang bersikap oposan. Partai *Al-Adala (PJD)* dibentuk dari gabungan organisasi-organisasi Islam moderat dan kelompok pendukung Kerajaan. Di bawah nama *the Constitutional and Democratic Popular Movement (MPDC)*, koalisi ini bertarung dalam pemilu legislatif 1997 dan berhasil masuk parlemen pertama kali dengan memenangkan 9 kursi. Pada 1998, terjadi perubahan nama partai menjadi *the Justice and Development Party*. Dalam pemilu legislatif 2002, PJD memenangkan 42 dari 295 kursi, serta menjadi salah satu kekuatan politik utama di Maroko.<sup>11</sup> Setelah empat tahun pemerintahan koalisi pimpinan PJD berjalan, pada 5 September 2015, Maroko menyelenggarakan pemilu lokal dan regional. Dalam pemilu lokal, partai oposisi *the Authenticity and Modernity Party (PAM)* berhasil memenangkan suara terbanyak dengan 6.655 kursi di dewan lokal, atau 21,12%, diikuti oleh Partai Istiqlal dengan 5.106 kursi, atau 16,22%, sedangkan PJD menduduki urutan ketiga dengan 5.021 kursi atau 15,94%.<sup>12</sup> Meski mengalami kekalahan dalam pemilu lokal, PJD berhasil memenangkan 174 kursi dalam pemilu regional, atau 25,66% memimpin perolehan suara di beberapa kota besar.

Berbeda dengan *al-Adl/JC*, PJD tidak mempersoalkan fondasi politik kerajaan Maroko. Partai itu mendukung monarki dan tidak

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>9</sup> Michael M. Laskier, "A Difficult Inheritance: Moroccan Society under King Mohammed VI", *Middle East Review of International Affairs*, Vol.7, No.3, 2003, hlm.4; Lihat juga, Dalmasso & Cavatorta, hlm. 4.

<sup>10</sup> Laskier, *ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>12</sup> "PJD Comes Third in Morocco's Local, First in Regional Elections", *Kuwait News Agency*, 5 September 2015, (diakses pada 16 Oktober 2015).

menyerukan retorika perubahan sosial yang bertujuan membentuk negara Islam. Sebaliknya, PJD memandang bahwa negara dan masyarakat tidak perlu di-Islamisasi karena Maroko sudah merupakan negara Muslim. PJD teguh memegang prinsip mempertahankan identitas Islam masyarakat Maroko melalui legislatif dan institusional tatkala identitas tersebut terancam.

*Kelompok ketiga, Salafiya Jihadiya* merupakan kelompok radikal yang bertujuan menggulingkan pemerintahan melalui cara kekerasan. Kelompok ini merupakan minoritas dan tidak mendapat banyak dukungan, namun disinyalir bertanggungjawab dalam peristiwa penyerangan pada Mei 2003 di Kasablanka. Secara historis, eksistensi kelompok ini berawal pada 1980an, tatkala Raja Hassan II mengizinkan Arab Saudi untuk menyebarkan paham Wahabi untuk meng-*counter* Islam politik di Maroko. Konsekuensinya, generasi baru ulama radikal disekolahkan di Arab Saudi, termasuk Omar al-Haddouci, Hassan Kettani, Ahmed al-Raffiki, Abdelkarim Chadli dan Muhammad Fizazi. Semua tokoh-tokoh ini merupakan ideolog kunci dari *Salafiya Jihadiya*. Sebagaimana yang telah disinggung bahwa eksistensi Arab Saudi di Maroko adalah untuk meng-*counter* perkembangan Islam Politik. Arab Saudi merupakan negara tempat lahirnya ideologi Wahabi yang sangat mendukung Salafiyah Jihadiyyah, karena itu wajar kiranya banyak para ulama yang belajar di Saudi untuk memperkuat pemahaman keagamaan akan Islam dan Jihad.

Pasca Perang Teluk 1991, para tokoh ulama ini menjaga jarak dengan Arab Saudi yang dianggap turut membantu invasi AS dan mulai mengkritisi otoritas kerajaan Maroko. Secara ideologis, *Salafiya Jihadiya* terinspirasi oleh tulisan dan pidato dari Sayyid Qutb, Omar Abd al-Rahman, Abu Qatada dan Osama bin Laden. Doktrin yang dihasilkan berupa versi radikal dari Salafisme yang ingin menggulingkan monarki melalui jalan kekerasan. *Salafiya Jihadiya* menolak demokrasi dan menuduh rezim Maroko sebagai murtad. *Salafiya Jihadiya* mengklaim bahwa aksi lokal melawan kaum Muslim yang murtad lebih penting ketimbang perang melawan orang kafir.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Thomas Renard, "Moroccan Crackdown on salafiya Jihadiya

*Kelompok keempat, Sufi Zaouiya Boutchichia*, merupakan kelompok yang memiliki hubungan dekat sekaligus pendukung monarki. Kelompok sufi ini seringkali dipinggirkan dalam kajian politik Maroko, meski merupakan aktor penting yang berperan dalam pengakuan legitimasi monarki. Peran penting dari kelompok ini adalah sebagai penghubung kelompok religius kelas menengah dengan monarki. Gerakan ini beraliansi dengan monarki dalam bidang politik dan sosial, dan dapat dimobilisir untuk menghadapi oposisi kelompok Islam lainnya.<sup>14</sup>

Ditengah proses transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis dan berkembangnya politik Islam, Maroko harus menghadapi tantangan lainnya yakni ancaman terorisme. Serangan bom pada 16 Mei 2003 di Kasablanka meruntuhkan keyakinan sebelumnya bahwa Maroko "*immune*" dari aksi terorisme. Aksi bom tersebut dilakukan dengan target yakni pusat komunitas Yahudi, restoran dan klub sosial Spanyol, hotel, dan Konsulat Belgia, yang menewaskan 41 orang dan lebih dari 100 orang luka-luka. Pihak otoritas Maroko kemudian menuding kelompok *Jamaa Islamiya Moukatila Maghreb* (*the Moroccan Islamic Combat Group/ GICM*) bertanggungjawab atas aksi terorisme tersebut.

Aksi terorisme di Maroko ini mendapat perhatian dunia internasional dan menunjukkan bahwa aksi ini merupakan konsekuensi dari kehadiran gerakan teroris transnasional di wilayah Maroko. Kelompok GICM yang didirikan oleh Nafia Noureddine yang berkaitan erat dengan kelompok radikal *Salafiya Jihadiya*, disinyalir memiliki afiliasi dengan Al Qaida yang memperoleh pelatihan militer dan bantuan materi dari Osama bin Laden. PBB, AS, dan Inggris kemudian memasukkan kelompok GICM ke dalam daftar organisasi teroris yang berbahaya. Pada 10 Oktober 2002, PBB mengeluarkan larangan beroperasi bagi kelompok tersebut di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1267. Di tahun yang sama, pemerintah AS memasukkan

Recruitment of Fighters for Iraq", *Terrorism Focus*, No.5, No.27, 23 Juli 2008, dalam [http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=5072&no\\_cache=1#ViWayytlTcc](http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews[tt_news]=5072&no_cache=1#ViWayytlTcc), (diakses pada 20 Oktober 2015).

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

kelompok GICM ke dalam organisasi teroris asing. Sejalan dengan AS, di bawah UU Terorisme 2000, pemerintah Inggris memberlakukan hukuman tahanan 10 tahun bagi anggota GICM.

Dalam konteks melawan radikalisme di Maroko, pemerintah AS berpandangan bahwa kelompok Islam moderat sebaiknya dilibatkan dalam proses demokratisasi, seperti dilibatkannya partai PJD. “*The PJD can act as a buffer against Al-Qaeda inspired groups that seeks to mobilize the poorest and most marginalize. That is what the US seems to think*”.<sup>15</sup> Ada pula yang berpandangan bahwa meningkatnya partisipasi politik dari kelompok Islam moderat merupakan cara terbaik untuk mencegah berkembangnya ekstrimisme di Maroko.

### **Problematika Kekuatan Politik Islam di Sudan**

Sudan termasuk dari negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low development index countries*) namun tetap memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara Afrika lainnya. Sektor yang paling menonjol dari Sudan adalah pendidikan, yang membuat tingkat literasi di negara tersebut mencapai 71.9 persen, sebuah angka yang cukup tinggi diantara negara-negara *low development index*.<sup>16</sup> Namun Sudan memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi dengan pendapatan perkapita perhari hanya \$ 2.7 per hari (sekitar \$ 987 per tahun). Belum lagi didukung dengan tingkat korupsi yang amat fatal dari pemerintahan Omar Bashir yang membuat Sudan berada pada tingkat 173 dari 175 negara.<sup>17</sup> Berkaitan dengan pengelolaan negara yang koruptif dan konflik sipil yang panjang, Sudan berada pada negara yang tertenging nomor 4 dari

<sup>15</sup> Erik Fattorelli, “Morocco between Terrorism, Islamism, and Democratisation: a Cosmetic Approach”, 2009, dalam [http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/11883/ssoar-2009-fattorelli-morocco\\_between\\_terrorism.pdf?sequence=1](http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/11883/ssoar-2009-fattorelli-morocco_between_terrorism.pdf?sequence=1), (diakses pada 18 Oktober 2015).

<sup>16</sup> Data HDR 2014.

<sup>17</sup> “Sudan: Economic Indicators”, dalam <http://www.tradingeconomics.com/sudan/indicators>, diunduh pada 10 Agustus 2015; ICG, “Divisions in Sudan’s Ruling Party and the Threat to the Country’s Future Stability,” Crisis Group Africa Report No. 174, 4 Mei 2011, hlm. 13.

yang paling bawah dalam daftar *Fragile State Index*.<sup>18</sup>

Islam merupakan agama mayoritas di Sudan yang mencapai 97% pada pasca lepasnya Sudan Selatan dari wilayah kekuasaan Sudan. Mayoritas Muslim Sudan adalah Sunni yang menganut madzhab Maliki. Banyak diantara *fuqaha*, orang yang memiliki otoritas untuk mengajarkan Islam, adalah ulama sufi yang mengajarkan mistisisme. Kuatnya sufisme ini seiring dengan Islam datang ke Sudan dengan proses Islamisasi dan Arabisasi dari negara-negara Afrika Utara melalui perdagangan, pernikahan campuran (dengan orang Arab) dan interaksi yang intens.<sup>19</sup>

Melekatnya Islam dalam masyarakat Sudan melalui sufisme yang hadir dalam *tariqah-tariqah* yang kuat dikalangan Muslim konservatif, yang dibawa oleh ulama-ulama Arab, memiliki dampak politik yang panjang.<sup>20</sup> Penguasaan gerakan Al-Mahdi yang memerintah Sudan pada masa kekuasaan *Turko-Egyptian* dan *Anglo-Egyptian* memberikan warna tersendiri bahwa Islam dan politik begitu erat di Sudan. Hubungan lintas batas antara Mesir dan Sudan yang terjadi dalam praktek perdagangan perbudakan di Darfur dan Khartoum yang memiliki potensi ekonomi besar telah membuat eksistensi ras Arab menguat di bagian utara Sudan yang pada akhirnya berkembang menjadi identitas yang berbasis ras.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, ras Arab menduduki status yang lebih tinggi dan secara otoritarian menguasai sumber-sumber politik dan ekonomi sehingga menentukan pembentukan identitas nasional Sudan yang berbasis Arab dan Islam.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Fragile State Index 2015, <http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf>, (diakses pada 10 Agustus 2015).

<sup>19</sup> Maruyama Daisuke, “Redefining Sufism in Its Social and Political Contexts: The Relationship between Sufis and Salafis in Contemporary Sudan,” *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 8 Maret 2015, hlm. 40–56.

<sup>20</sup> H.A. MacMichael, *A History of the Arabs in Sudan, and Some Accounts of the People who Preceded Them and of the Tribes Inhabiting Darfur*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)

<sup>21</sup> Mohamed Ibrahim Nugud, *Slavery in the Sudan: History, Documents, and Commentary*, (New York: Palgrave Macmillan, 2013)

<sup>22</sup> Amir H. Idris, *Sudan’s Civil War: Slavery, Race, and Formational Identities*, (Lewiston: Edwin Mellen Press, 2001),

Sedangkan ras Afrika Sudan mendapatkan posisi yang lebih rendah meskipun sebagian dari mereka juga memiliki status sebagai Muslim (Islam) terutama yang berdomisili di wilayah Darfur sebagai akibat dari *stereotype* perbudakan di masa lalu. Dalam hal ini, gerakan Islam muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap politik rasisme dan otoritarianisme di Sudan.<sup>23</sup>

Bashir memberangus partai-partai politik dan menekan gerakan tokoh-tokoh oposisi agar lebih mudah melakukan dominasi politik. Hal ini tidak mengherankan jika kita melihat *trend* bahwa rezim militer diktator yang berkuasa di Sudan muncul melalui serangkaian kudeta militer. Kediktatoran ini telah menciptakan iklim yang negatif terhadap pertumbuhan demokrasi sehingga memunculkan gerakan-gerakan perlawanan yang terinisiasi oleh ideologi Ikhwanul Muslimin (IM) yang telah ada sejak awal kemerdekaan dengan tokoh sentral Hassan Turabi (ICF/NIF/PCP) dan Al-Mirghani (NUP/DUP). Berkembangnya IM di Sudan tidak lepas dari faktor geo-politik yang mempengaruhinya, dimana Sudan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Mesir tempat lahirnya gerakan IM. Keterkaitan Khartoum dan Kairo tidak hanya erat dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang pendidikan. Meskipun tidak secara utuh dan menyeluruh, Universitas Khartoum sebagian besar masih berkiblat pada universitas al-Azhar baik secara akademis maupun aktivisme. Selain itu, Sudan dan Mesir memiliki keterkaitan dan keterpengaruh sejarah yang panjang dalam bentuk kekuasaan (*Turko-Egyptian rule*) dan penjajahan (*Anglo-Egyptian rule*), sehingga perubahan sosial-politik di Mesir akan memiliki pengaruh besar bagi Sudan.

Sedangkan Sadiq Al-Mahdi (Umma Party) merupakan transformasi institusional dari gerakan Al-Mahdi yang pernah berkuasa di Sudan. Gerakan-gerakan Islam semacam Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan modernis yang berbasis perkotaan (*urban-centred modernist movements*) yang dekat dengan politik dan adaptif dengan perubahan sosial yang ada. Terutama jika dibandingkan dengan pola-pola

organisasi sufisme yang tradisional (*tradition-bound sufi order*), sehingga keberadaannya tidak mendapatkan dukungan penuh dari *grass root* terutama kalangan sufi tradisional.

Relasi rezim militer Omar Bashir dengan gerakan-gerakan Islam mengalami pasang surut dalam bentuk koalisi dan konfrontasi, misalnya merekrut Hasan Turabi untuk membentuk partai bersama di NCP karena Bashir masih mempercayai potensi kuat dari politik Islam untuk mendukung kekuasaannya. Hal yang menjadi sangat identik di perpolitikan Sudan adalah fokus yang sangat berlebihan dikalangan elit politik untuk mencari dukungan dari masa gerakan Islam, sehingga kehidupan Islam seakan dipaksa untuk selalu terkait dengan politik negara. Hal ini pula yang menjadi strategi Omar Bashir untuk melanggengkan pengaruh politiknya di Sudan.

Serangkaian momentum politik dan gelombang *Arab Spring* dari negara-negara Afrika Utara membuat gerakan oposisi menggeliat. Gejala *Arab Spring* telah menumbuhkan gerakan *new intifada* di Sudan. Meskipun terjadi di berbagai kota besar, gerakan ini belum berdampak masif bagi terjadinya *regime change* di Sudan. Padahal jika kita menilik kondisi perekonomian Sudan yang cukup parah, terutama setelah lepasnya beberapa kilang minyak yang menjadi suplai utama anggaran negara jatuh ke tangan Sudan Selatan dan krisis ekonomi sebagai akibat dari *mismanagement* dalam pemerintahan, seharusnya gerakan *new intifada* bisa membawa perubahan politik yang fundamental di Sudan. Kegagalan ini disebabkan karena tidak adanya tokoh sentral simbol perlawanan pasca *Arab Spring*. Kelompok oposisi terkemuka justru terpecah antara tokoh oposisi Hasan Turabi dan Sadeq el Mahdi. Protes yang terjadi di tahun 2011 hingga 2015 masih bersifat sporadis dan tidak masif, dukungan yang kuat dari militer sehingga rezim secara represif dan otoriter masih bisa meredam protes masa, dan tidak tersedianya ruang bagi publik untuk melakukan perlawanan dan mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap pemerintah.

Keengganan Bashir untuk berkompetisi secara *fair* yang diiringi kekuatan militer yang mendukungnya secara kuat membuat masa depan

---

bab 4.

<sup>23</sup> Amir H. Idris, *Conflict and Politics of Identity in Sudan*, (New York: Palgrave, 2005)

kehidupan demokratis di Sudan terlihat suram. Hal ini membuat masyarakat Sudan memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam membangun kehidupan lingkungan politik yang kompetitif dan multi partai. Pemilu di Sudan tidak dilakukan secara reguler dengan perodesasi tertentu, misalnya secara umum pemilu di negara-negara dunia setiap 5 tahun sekali. Hal ini karena yang paling memungkinkan adalah perang sipil dengan Sudan Selatan (dulu Sudan) pada pasca kemerdekaan dan disusul konflik sipil di wilayah Darfur. Selain itu, Sudan termasuk negara yang sering berganti sistem politiknya tergantung rezim yang berkuasa dan kestabilan politik negara.

Serangkaian konflik sebelum pisahnya Sudan Selatan membuat data yang akurat tentang pemilu Sudan sangat sulit didapatkan. Namun pisahnya Sudan Selatan dan menurunnya konflik membuat pemilu di Sudan semakin menapaki titik terang. Pemilu tahun 2015 merupakan pemilu presiden dengan tingkat partisipasi terendah yaitu sekitar 46.40 %. Meski demikian, persentase kemenangan Bashir cukup tinggi hingga mencapai 94.05% jika dibandingkan pemilu sebelumnya 75.68% (1996), 86.5% (2000), dan 68.24% (2010).<sup>24</sup> Hasil ini justru membuktikan popularitas dan legitimasi Bashir pada pemilu 2015 semakin rendah. Kemenangan ganjil ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa kondisi, *pertama*, protes yang terjadi sepanjang tahun 2011-2015 sebagai pengaruh dari *Arab springs* dan keterpurukan ekonomi. *Kedua*, pasca pisahnya Sudan Selatan, Bashir kehilangan momentum untuk menciptakan ancaman bersama (*common enemy*) bagi memonopoli dukungan rakyat. *Ketiga*, terjadinya boikot terhadap pemilu 2015 yang dilakukan kalangan oposisi: Shadiq Al-Mahdi (*Umma Party/UP*), Hassan Turabi (*People Congress Party/PCP*) dan Al-Mirghani (*Democratic Unionist Party/DUP*) serta masyarakat Darfur yang apatis terhadap perubahan politik Sudan pada paska pemilu 2015.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Lihat [http://www.espac.org/presidential\\_pages/presidential\\_parliamentary.asp](http://www.espac.org/presidential_pages/presidential_parliamentary.asp); [http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2297\\_00.htm](http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2297_00.htm), diunduh pada 2 April 2015; "Elections in Sudan," <http://africanelections.tripod.com/sd.html>, (diakses pada 18 Oktober 2015).

<sup>25</sup> Adela Suliman, "More of the same": Bashir sweeps Sudan

Secara eksplisit pemerintah Sudan mempersepsikan bahwa pasca lepasnya Sudan Selatan, Sudan merupakan pemerintahan negara Islam yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam sehingga tidak diperlukan lagi proses-proses Islamisasi untuk meng-Islam-kan seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam. Namun rendahnya partisipasi pemilu legislatif pada tahun 2015 ini memberikan dugaan dan indikasi lain, terutama kasus boikot yang dilakukan oleh oposisi yang sebagian besar dari kalangan gerakan Islam seperti Hassan Turabi (PCP) dan Sadiq Al-Mahdi (UP). Indikasi ini juga terlihat dari perolehan DUP yang meningkat dari 4 kursi pada pemilu 2010 menjadi 40 kursi pada pemilu legislatif 2015 (hasil akumulasi DUP pimpinan Al-Mirghani dan DUP pimpinan Jalal Al-Digair). Bisa jadi pemilu 2015 ini merupakan awal dari kebangkitan menguatnya eksistensi partai-partai Islam di Sudan.

Meskipun mengalami serangkaian perang sipil yang panjang dengan gerakan separatis *Sudan People Liberation Movement/Army* (SPLM/A) di wilayah selatan dan *Sudan Liberation Movement* (SLM) di Darfur— yang memancing "campur tangan" internasional-- gerakan oposisi Islam yang dipelopori oleh Turabi, Sadiq Al-Mahdi dan Al-Mirghani memberikan harapan yang konsisten akan pertumbuhan demokrasi di Sudan. Namun pada sisi lain gerakan Islam-militeristik yang dibawa oleh Bashir dan penguasa militer sebelumnya menggunakan politik otoritarianistik dalam menjalankan roda pemerintahan terasa kontra produktif bagi pembentukan iklim demokrasi dan penguatan *civil society*. Meskipun tidak mengarah pada politik totalitarianisme namun Sudan masih harus menapaki jalan yang panjang menuju demokrasi.

### **Problematika Kekuatan Politik Islam di Somalia**

Somalia dihadapkan pada kekacauan politik dan konflik sosial yang tak berkesudahan. Berbagai kasus, seperti perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, pembajakan, perang antar

election," <http://www.aljazeera.com/news/2015/04/bashir-sweeps-sudan-election-150427111551251.html>, (diakses pada 15 Oktober 2015).

suku, dan kekacauan politik selalu mewarnai lembaran sejarah negara multi etnis ini, bahkan di tengah euforia *Arab Spring* yang menjadi momentum bagi perubahan iklim politik di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, Somalia justru terjebak dalam perang sipil yang akut sebagai imbas dari warisan era kolonialisme. Situasi ini mengantarkan Somalia menjadi negara gagal (*failed state*).<sup>26</sup>

Di tengah krisis yang berkepanjangan, para tokoh dan pemimpin di Somalia berusaha untuk membangun kembali negara melalui upaya rekonsiliasi dan konsolidasi politik. Pada tahun 2009, parlemen transisi (*Transitional Federal Parliament/TFP*) memilih pimpinan *The Alliance for Re-Liberation of Somalia* (ARS), Syekh Sharif Ahmad sebagai presiden pertama dengan perdana menteri Umar Abdurrashid Ali Sharmarke. Seiring berakhirnya masa pemerintahan interim, pada Agustus 2012, terbentuk *National Constituent Assembly/NCA* yang menjadi cikal bakal berdirinya pemerintahan federal Somalia.<sup>27</sup> Dalam pemilu pertama yang diselenggarakan NCA pada September 2012, Hassan Syekh Mahmoud berhasil unggul dalam perolehan suara mengungguli pesaingnya dari *Islamic Courts Union/ICU*, Syekh Sharif Ahmad. Terbentuknya Pemerintah Federal Somalia dibawah pimpinan Hassan Syekh Mahmoud menjadi langkah awal penegakkan demokrasi di Somalia.

Tercapainya rekonsiliasi pada era 2009-2012 tidak lepas dari peran klan dan kelompok Islam Sufi yang memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial-politik Somalia.<sup>28</sup> Diantara klan utama yang mempunyai peran signifikan dalam politik Somalia adalah Darood, Ishaq, Dir, dan Hawiya. Darood adalah klan terbesar di Somalia yang sebagian besar menempati wilayah timur laut dan barat daya Somalia, tepatnya di lembah Jubbah, sebelah utara Kenya. Mantan presiden Siyaad Barri dan Abdillah Yusuf Ahmad

<sup>26</sup> "The Failed State Index 2011", *The Fund for Peace*, dalam <http://www.fundforpeace.org>, diunduh pada 4 September 2015.

<sup>27</sup> Nuruddin Farah, et.al, *Somalia : A Nation Without A State*, Life and Peace Institute, (Stockholm: The Nordic Africa Institute, 2007).

<sup>28</sup> Jason Mosley, "Somalia's Federal Future : Layered Agendas, Risks and Opportunities", Africa Programme, September 2015.

berasal dari klan ini. Sementara klan Ishaq terkonsentrasi di utara, sebagian wilayah tengah dan selatan. Dari kedua suku ini berkembang tiga tarikat terbesar, yaitu Qadariyyah, Ahmadiyyah, dan Salihyyah.<sup>29</sup> Tradisi Islam sufi yang damai dan selaras dengan hukum adat menciptakan tatanan sosial yang harmonis selama berabad-abad, karena itu kelompok Islam sufi lebih mengedepankan pendekatan humanis ketimbang bersikap radikal dalam menghadapi setiap persoalan di Somalia.

Hubungan antara Islam dan klan di Somalia pun sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Islam sendiri sampai di Madinah dan mencapai puncaknya ketika terjadi migrasi kaum muslimin sekitar abad ke-8 ke wilayah pesisir Somalia akibat instabilitas sosial-politik di Jazirah Arab. Kehadiran dua tokoh sufi, Abdurrahman bin Ismail al-Jabrti atau yang lebih dikenal dengan Syekh Darood dan Syekh Ishaq bin Ahmad Al-Alawi—keduanya satu silsilah dengan nabi Saw- memperkuat relasi antara Islam dan klan di Somalia.<sup>30</sup> Keduanya menetap di utara Somalia sampai beranak pinak dan melahirkan konfederasi dua klan terbesar saat ini, yakni Darood dan Ishaq. Dalam perkembangannya, kedua klan ini menjadi cikal bakal lahirnya gerakan Islam—khususnya tarekat sufi—di Somalia. Salah satu tokoh dari klan Darood, Syekh Syarif Ahmad menjadi pelopor pergerakan politik kelompok sufi di Somalia yang memilih untuk melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah transisi dan membentuk pemerintahan koalisi ARS yang merupakan gabungan antara kelompok Islam moderat non-radikal di Somalia.

Secara historis, kebangkitan sufisme di Somalia dimulai pada abad ke-19 di bawah pimpinan tokoh sufi terkemuka Syekh Muhyiddin bin Syekh Uwais dengan beberapa muridnya yang mengembangkan aliran tarekat Qadariyyah. Hal yang menarik adalah bahwa sufi Somalia tidak seperti kebanyakan sufi umumnya yang terbiasa tinggal dalam lingkungan *zaawiyah* atau surau melainkan turut beraktivitas dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan. Pada tahun 1952, sejumlah tokoh sufi Islam

<sup>29</sup> Lihat, Abdurrahman M. Abdullahi, "Islamism and Politics in Somalia", *Chatham House*, 2012.

<sup>30</sup> *Ibid*.

mendirikan *Somalia Islamic League/Liga Islam Somalia* sebagai reaksi dari maraknya kristenisasi di Somalia.<sup>31</sup> Meski demikian, masih tetap saja ada diantaranya yang bereaksi melalui jalur ekstremisme, seperti halnya Ahlussunnah Wal Jama'ah yang bereaksi terhadap simbol kemusyrikan dan budaya barat yang berkembang, bahkan tidak sedikit pula yang bergabung dengan gerakan Ash-Shabab. Perbedaan interpretasi dalam memaknai prinsip-prinsip Islam menjadi salah satu faktor munculnya kelompok sufi yang lebih reaksioner.

Pasca kemerdekaan 1961, gerakan Islam kontemporer muncul dengan berbagai coraknya. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa alumnus perguruan tinggi Islam terkemuka di Timur Tengah yang kemudian mempromosikan ide-ide keislamannya dengan membentuk sejumlah gerakan Islam di Somalia. Gerakan Islam yang terkenal adalah *Harokah Al-Ittihad Al-Islami* yang didirikan pada tahun 1982. Gerakan ini menginspirasi lahirnya gerakan Islam moderat dan radikal, seperti *Al-Islah*, *Al-Itisham*, *Hizb al-Islam*, *Ash-Shabab*, dan *Salafiyah Jadidah*. Sebelumnya sudah ada gerakan Islam serupa, yakni *Harokah An-Nahdah* yang berdiri tahun 1967 di Mogadishu, *Wahadaat ash-Shabab al-Islami* tahun 1969 dan *Jamaat Ahlal Islam*. Para aktivisnya menjadi motor pergerakan Islam dalam menentang rezim militer-sosialis.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, keberadaan gerakan Islam sangat ditentang rezim Siyaad Barri dengan menetapkan undang-undang yang melarang berdirinya gerakan dan organisasi massa Islam di Somalia. Banyak para aktivisnya yang ditangkap dan mengasingkan diri ke Sudan, Mesir, Yaman, dan Arab Saudi. Mereka memperjuangkan Islam dari luar dan membangun jaringan dengan gerakan Islam transnasional, seperti IM, *Salafiyah*, *Jama'ah Tabligh* dan *Jama'ah Jihadiyyah*. Pasca lengsernya Siyaad Barri, gerakan Islam semakin menemukan momentumnya dengan maraknya aktivitas *Harokah Da'wah Islamiyyah* yang dipelopori oleh para ulama dan pemuda Somalia melalui penguatan peran dakwah Islam di sekolah maupun lembaga pendidikan. Mereka bahkan

mengisi kekosongan hampir di semua lini, baik dalam berdagang maupun aktivitas sosial kemasyarakatan.

Selain semaraknya dakwah Islam, Islam di Somalia juga diwarnai dengan munculnya gerakan Al-Islah yang didirikan oleh sejumlah tokoh IM di Somalia yang bertujuan menjaga nilai-nilai budaya Somalia dan menerapkan prinsip Islam dalam bernegara. Karena itu, dalam setiap aktivitasnya gerakan ini kerap bertentangan dengan rezim sosialis, sehingga banyak diantara para tokohnya seperti Syekh Mohammed Ahmad Nur, Dr. Ali Syekh Ahmed, Dr. Mohamed Yusuf Abdi, Syekh Ahmad Rasyid Hanafi, dan Syekh Abdullah Ahd Abdullah yang menjadi musuh rezim dan sejak lama hidup dipengasingan.<sup>33</sup> Dibawah pimpinan Syekh Mohammed Ahmed Nur, al-Islah menjadi gerakan Islam yang inklusif dan anti kekerasan. Kelompok ini lebih mengedepankan dakwah Islam melalui metode pendidikan Islam moderat sebagaimana yang digagas oleh Abduh maupun Al Afghani.

Meski mendapat sambutan dari masyarakat kelas menengah, keberadaan gerakan Islam sekelas IM di Somalia tidak begitu kuat terlebih jika dibandingkan dengan IM di Mesir maupun Sudan. Hal itu tidak lepas dari belum berkembangnya iklim intelektual (kampus) di Somalia sehingga kekuatan IM yang biasa berkembang dalam lingkungan intelektual Islam dapat dikatakan tidak begitu berperan secara signifikan. Selain itu, iklim politik Somalia yang sarat akan konflik dan perebutan kekuasaan lebih mendorong lahirnya gerakan Islam radikal, seperti *Ash-Shabab* maupun *Hizb Al-Islam*. Dengan kata lain, Somalia menjadi rumah yang nyaman bagi perkembangan gerakan Islam Jihadiyyah.

Sementara itu, kelompok Islam *Salafiyah-Jihadiyyah* terefleksikan dengan munculnya gerakan *Al-Ittihad Almahakim Al-Islamiyyah*, *Ash-Shabab*, dan *Hizb al-Islami*. Pada awalnya tujuan berdirinya gerakan itu adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim Siyaad Barri disamping untuk mendirikan pemerintahan yang lebih Islami. Agenda keislaman kelompok

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Abdurrahman M. Abdullahi, "The Islah Movement : Islamic Moderation in War-torn Somalia", dalam <http://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>, (diakses pada 20 Maret 2015).

*Salafiyah-Jihadiyyah* terlihat dengan dibentuknya pengadilan Islam atau *al-Mahakim Al-Islamiyyah* di sejumlah wilayah dibawah pimpinan *Fuqoha* atau seorang yang ahli dalam hukum Islam. Disini faktor klan menjadi penentu aktivitas *al-Mahakim*. Berdirinya sejumlah pengadilan Islam mendorong kekhawatiran AS dan negara-negara Barat akan kebangkitan Islam di Somalia. Mereka mengklaim bahwa kelompok ini adalah ancaman bagi keamanan regional dan global.

Disamping membangun jaringan dengan kelompok Islam lokal, *Salafiyah Jihadiyyah* mempunyai relasi yang kuat dengan kelompok *Al Qaeda in Arabian Peninsula* (AQAP). Hubungan kedua kelompok terjalin sejak awal tahun 2000, ketika Osama bin Laden secara resmi menyatakan akan memberikan dukungan finansial dan fasilitas persenjataan bagi gerakan Islam Somalia. Dukungan ini jelas menguntungkan kelompok Islam radikal di Somalia khususnya setelah melemahnya basis kekuatan *Al-Ittihad Al-Islamiyyah* akibat serangan pasukan militer Ethiopia pada tahun 2002. Untuk mengisi kekosongan kekuatan Islam, pada tahun 2003 berdiri gerakan Islam baru yang lebih radikal dikenal dengan sebutan *Harokah Ash-Shabab Al-Mujahidin*. Menurut David Shinn, *Ash-Shabab* dianggap sebagai gerakan Islam paling kuat di Somalia setelah kegagalan pemerintahan koalisi ICU di Mogadishu.<sup>34</sup> Kehadiran *Ash-Shabab* sebagai garda gerakan Islam radikal di Somalia menjadikan konflik antara kelompok Islam di satu sisi dan pemerintah yang didukung kekuatan militer asing tidak terelakkan lagi. Akibatnya selama beberapa dekade Somalia didera konflik akut yang berkepanjangan.

Konflik internal yang berkepanjangan itu menimbulkan dampak yang cukup signifikan tidak hanya bagi Somalia tetapi juga bagi sejumlah negara yang mempunyai kepentingan di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Hal ini mendorong sejumlah kekuatan politik internasional untuk terlibat dalam konflik internal Somalia. Ethiopia adalah negara yang terlibat cukup besar dalam pusaran konflik Somalia. Keterlibatan itu tidak lepas dari faktor historis, demografis, maupun

geografis yang melatarbelakanginya. Secara historis, sejak masa kolonialisme, kedua negara kerap berseteru. Pembagian wilayah yang tidak melihat faktor *clanism* menjadi awal penyebab terjadinya konflik. Disamping itu, perbedaan agama dan budaya semakin meningkatkan ketegangan kedua negara.

Selain Ethiopia, AS dan negara-negara Barat ikut terlibat dalam dinamika politik Somalia. Keterlibatan AS tidak lepas dari dua hal, yakni kontra-terorisme dan maraknya aksi bajak laut. Indikasi keterlibatan itu sudah terlihat sejak lama, bahkan sejak masa pemerintahan Siyaad Barri, ketika kekuatan AS bercokol untuk mengkanter menyebarnya paham sosialis-marxisme di Somalia. Kemudian intervensi AS semakin meningkat pada tahun 2001 terutama pasca tragedi WTC. Wendy Sherman, Wakil Menteri Luar Negeri AS, menyatakan dalam pidatonya, "*A secure and united Somalia weakens the forces of extremism that threaten other countries, including the United States*".<sup>35</sup> Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan John Norris, bahwa kepentingan AS di Somalia bukan hanya masalah kontra-terorisme, tetapi juga karena faktor lain, yakni bajak laut yang sudah mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian AS dan sejumlah negara di dunia. Meski ada upaya untuk terus meningkatkan intervensi militer di Somalia, namun belakangan dunia internasional mulai mencari cara untuk mengatasi krisis Somalia tanpa intervensi militer. Salah satunya adalah dengan penyelesaian konflik melalui pendekatan sosio-kultural-keagamaan dengan mengupayakan jalan damai antar kekuatan politik dan klan di Somalia, sehingga jika stabilitas politik dan keamanan terwujud, maka konflik sosial dan maraknya aksi bajak laut yang lebih bermotif ekonomi akan dapat terselesaikan.

## Penutup

Agama dan politik (demokrasi) apalagi dalam konstelasi dunia Islam tampaknya selalu menjadi wacana menarik untuk diperbincangkan. Bahkan, kedua hal tersebut seolah menjadi dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, Cunningham menyebutnya sebagai dua hal yang

<sup>34</sup> David Shinn, "Al Shabaab's Foreign Threat to Somalia", *Foreign Policy Research Institute*, 2011.

<sup>35</sup> *Ibid.*

saling tumpang-tindih (*overlapping*) dan tidak pernah berujung, sehingga selalu menemukan justifikasi untuk menautkan diri.<sup>36</sup>

Namun, realitas itu acapkali menumbuhkan kecurigaan dari kalangan sekuleris, yang senantiasa memandang curiga terhadap peran agama dalam konteks politik (demokrasi). Artinya, ketika Islam melekat kepada kehidupan politik, maka politik Islam dianggap tidak akan menyediakan tempat bagi tumbuhnya iklim demokrasi. Namun, pandangan ekstrem sebaliknya juga menggejala di sebagian kalangan Islam sendiri, yang apriori terhadap segala konsep yang lahir dari dunia Barat/sekuler (termasuk partai politik, pemilu dan parlementariat). Baik kaum sekuleris maupun kaum Islamis sama-sama memandang Islam dan demokrasi sebagai sesuatu yang tidak bisa disandingkan.

Wacana "*Islamic exceptionalism*" sebagai dasar tidak selarasnya Islam dan demokrasi dalam kasus Maroko, Sudan dan Somalia menjadi kurang tepat. Sebab fenomena "*Arab exceptionalism*" tampaknya lebih bisa mengilustrasikan mengapa mayoritas negara-negara Arab tidak demokratis.<sup>37</sup> Artinya, tidak adanya demokrasi di dunia Arab selama berabad-abad bukan akibat tidak kompatibelnya demokrasi dengan Islam. Melainkan faktor politico-historis bangsa Arab yang telah lama mempraktikkan sistem kenegaraan yang bersifat dinasti-otoritarian.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Frank Cunningham, "The Conflicting Truths of Religion and Democracy", dalam John Rowan (ed.), *Human Rights and Democracy*, (Charlottesville, V.A.: Philosophical Documentation Centre, 2005), hlm.65-80.

<sup>37</sup> Konsep *Islamic exceptionalism* didasarkan pada anggapan bahwa Islam sebagai faktor/pengecualian yang menyulitkan tumbuhnya iklim demokrasi. Begitu juga *Arab exceptionalism* merupakan sebuah anggapan yang menyatakan budaya Arab sebagai faktor yang menyulitkan tumbuhnya iklim yang demokratis. Riset ini didasarkan pada penelitian pemilu di 47 negara mayoritas Muslim yang menunjukkan bahwa negara non Arab memiliki iklim pemilu hampir dua puluh kali lebih kompetitif di bandingkan negara-negara Arab. Lihat Alfred Stepan dan Graeme B. Robertson, "Arab, not Muslim, Exceptionalism," *Journal of Democracy*, 15, No.4, Oktober 2004, hlm.140-146.

<sup>38</sup> Sedangkan yang menjadi kontras adalah bagaimana nilai-nilai demokratis dalam Islam tersebut diimplementasikan oleh kalangan radikal dalam bentuk authoritarian, sedangkan kalangan moderat menafsirkannya dalam koridor yang keadilan dan Islamis. Lihat, Ahmad S. Mousalli, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Right*, (Florida: University

Fenomena *Arab Spring*, menumbuhkan kesadaran politik warga negara untuk mendorong pemerintah menyelenggarakan pemilu dan menumbuhkan iklim politik yang lebih demokratis. Dalam kasus Maroko, Sudan, dan Somalia, meskipun "rezim yang lama" tetap berkuasa, menguatnya dukungan masyarakat terhadap partai-partai Islam membuat pemerintah harus berpikir ulang tentang efektivitas sistem otoritarian dalam melanggengkan kekuasaan.

Baik di Maroko, Sudan dan Somalia, gerakan Ikhwanul Muslimin tidak lagi menjadi hal yang asing baik secara ideologis maupun gerakan sosial. Tak berlebihan jika Valentine Columbo, guru besar geopolitik dunia Islam Universitas Eropa di Roma, menyebut bahwa *Arab Spring* hakekatnya bagai musim semi Ikhwanul Muslimin di jazirah Arab. Sebab pada kenyataannya organisasi sosial-politik yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslim yang tampil dominan dalam konstelasi politik demokrasi.

Melihat realitas ini maka peran kekuatan politik Islam dalam kerangka membangun demokrasi, pelan tapi pasti kian mapan. Dibandingkan Somalia, negara Maroko dan Sudan lebih siap berdemokrasi. Hanya saja kekuasaan Raja Muhammad IV dan Omar Bashir yang terlalu besar membuat iklim demokrasi terhambat untuk tumbuh. Ketidaksiapan negara dalam menghadapi tumbuhnya kesadaran demokratis rakyatnya, mendorong pemerintah menggunakan tangan besi untuk melakukan monopoli politik. Demokrasi dianggap sebuah ancaman. Kemenangan partai Islam dalam kontestasi politik harus berujung pada pemberangusan seperti kasus FIS Aljazair (1990), Refah di Turki (1995), Morsi di Mesir (2012). Ini menegaskan bahwa nihilnya iklim demokrasi di Timur Tengah adalah "*Arab exceptionalism*".

## Referensi

### Buku

Mousalli, Ahmad S. *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Right*. Florida: University of Florida Press. 2003.

---

of Florida Press, 2003), hlm. 158-167. Baca juga Fares Al-Braizat, "Muslim and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama's Cultural Approach," *International Journal of Comparative Sociology*, Vol. 43, No. 3-5, 2002, hlm.269-299.

Idris, Amir H. *Conflict and Politics of Identity in Sudan*. New York: Palgrave. 2005.

-----, *Sudan's Civil War: Slavery, Race, and Formational Identities*. Lewiston: Edwin Mellen Press. 2001.

Cunningham, Frank. "The Conflicting Truths of Religion and Democracy", dalam John Rowan (ed.) *Human Rights and Democracy*, Charlottesville, V.A.: Philosophical Documentation Centre. 2005.

MacMichael, H.A. *A History of the Arabs in Sudan, and Some Accounts of the People who Preceded Them and of the Tribes Inhabiting Darfur*. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.

Nugud, Mohamed Ibrahim. *Slavery in the Sudan: History, Documents, and Commentary*. New York: Palgrave Macmillan. 2013.

### Jurnal

Al-Braizat, Fares. "Muslim and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama's Cultural Approach". *International Journal of Comparative Sociology*. Vol.43. No. 3-5. 2002.

Laskier, Michael M. "A Difficult Inheritance: Moroccan Society under King Mohammed VI". *Middle East Review of International Affairs*. Vol.7. No.3. 2003.

Maruyama, Daisuke. "Redefining Sufism in Its Social and Political Contexts: The Relationship between Sufis and Salafis in Contemporary Sudan". *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*. Vol.8. 2015.

Stepan, Alfred & Robertson, Graeme B. "Arab, not Muslim, Exceptionalism," *Journal of Democracy*, Vol.15. No.4. 2004.

Warburgm, Gabriel R. "Islam and the State in Numeiri's Sudan". *Journal of the International African Institute*. Vol. 55. No. 4. 1985.

### Makalah

Abdullahi, Abdurrahman M. "Islamism and Politics in Somalia". Chatham House. 2012.

Dalmaso, Emanuela & Cavatorta, Francesco. "Political Islam in Morocco: Negotiating the Liberal Space Post 2003". Working Papers in International Studies No. 4. Centre for International Studies, Dublin City University. 2011.

ICG. "Divisions in Sudan's Ruling Party and the Threat to the Country's Future Stability". Crisis Group Africa Report. No. 174. 2011.

Mosley, Jason. "Somalia's Federal Future : Layered Agendas, Risks and Opportunities". Africa Programme. 2015.

Nuruddin, Farah, et.al . "Somalia : A Nation Without A State". Life and Peace Institute, The Nordic Africa Institute : Stockholm. 2007.

Shinn, David. "Al Shabaab's Foreign Threat to Somalia". Foreign Policy Research Institute. 2011.

### Internet

Abdullahi, Abdurrahman M, "Islamism and Politics in Somalia," dalam <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Africa/120612summary.pdf>, diunduh pada 13 November 2015.

-----, "The Islah Movement : Islamic Moderation in War-torn Somalia", dalam <http://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>, diunduh pada 15 Oktober 2015.

Ahmed, Nazeer, "The Murabitun in the Maghreb," dalam <http://historyofislam.com/murabitun/>, diunduh pada 11 November 2015.

"Elections in Sudan", dalam <http://africanelections.tripod.com/sd.html>, diunduh pada 18 Oktober 2015.

Fattorelli, Erik, "Morocco between Terrorism, Islamism, and Democratisation: a Cosmetic Approach", 2009, dalam [http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/11883/ssoar-2009-fattorelli-morocco\\_between\\_terrorism.pdf?sequence=1](http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/11883/ssoar-2009-fattorelli-morocco_between_terrorism.pdf?sequence=1), diunduh pada 18 Oktober 2015.

"Fragile State Index 2015", dalam <http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf>, diunduh pada 10 Agustus 2015.

[http://www.espac.org/presidential\\_pages/presidential\\_parliamentary.asp](http://www.espac.org/presidential_pages/presidential_parliamentary.asp), diunduh pada 2 April 2015.

[http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2297\\_00.htm](http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2297_00.htm), diunduh pada 5 Maret 2016.

"PJD Comes Third in Morocco's Local, First in Regional Elections", *Kuwait News Agency*, 5 September 2015, diunduh pada 16 Oktober 2015.

"Sudan: Economic Indicators", dalam <http://www.tradingeconomics.com/sudan/indicators>, diunduh pada 10 Agustus 2015.

Suliman, Adela, “‘More of the same’: Bashir sweeps Sudan election,” <http://www.aljazeera.com/news/2015/04/bashir-sweeps-sudan-election-150427111551251.html>, diunduh pada 15 Oktober 2015.

Thomas, Renard, “Moroccan Crackdown on salafiya Jihadiya Recruitment of Fighters for Iraq”, *Terrorism Focus*, Vo.5, No.27, 2008, dalam [http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=5072&no\\_cache=1#.Vi-WayytITcc](http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews[tt_news]=5072&no_cache=1#.Vi-WayytITcc), diunduh pada 20 Oktober 2015.

“The Failed State Index 2011”, The Fund for Peace, dalam <http://www.fundforpeace.org>, diunduh pada 4 September 2015.

## TENTANG PENULIS

### **Ahmad Helmy Fuady**

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: [elhelmy@yahoo.com](mailto:elhelmy@yahoo.com)

### **Eka Suaib**

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: [ekasuaib1966@gmail.com](mailto:ekasuaib1966@gmail.com)

### **Irhamna Irham**

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: [irhamna.irham@gmail.com](mailto:irhamna.irham@gmail.com)

### **Kadek Dwita Apriani**

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: [kadek88@gmail.com](mailto:kadek88@gmail.com).

### **Kurniawati Hastuti Dewi**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: [kurniawati.dewi@yahoo.com](mailto:kurniawati.dewi@yahoo.com)

### **La Husen Zuada**

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: [husenzuadaui@gmail.com](mailto:husenzuadaui@gmail.com)

### **Moch. Nurhasim**

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com)

### **Nostalgawan Wahyudi**

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan\_jauzy@yahoo.com

### **Nyimas Latifah Letty Aziz**

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

### **R. Siti Zuhro**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiewieqsz@yahoo.com.au

### **Waode Syifatu**

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

### **Yusuf Maulana**

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

